ABSTRAK

SAHLAN MUKMIN

190510134

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
(Studi Penelitian di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan)
(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dan Dr, Joelman Subaidi, S.H., MH.)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging merupakan persoalan serius yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Aktivitas illegal logging tidak hanya menimbulkan kerusakan hutan, tetapi juga berdampak pada terganggunya fungsi ekologis, meningkatnya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Meskipun telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, praktik illegal logging masih terus berlangsung, sehingga menuntut peran aktif aparat penegak hukum, khususnya Polisi Hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran Polisi Hutan melalui Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bakongan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Kecamatan Trumon Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi Hutan dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Polisi Hutan dan masyarakat sekitar kawasan hutan, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan fakta lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh BKPH Bakongan dilakukan melalui upaya preventif berupa patroli hutan, penyuluhan hukum, dan pemasangan papan larangan, serta upaya represif berupa penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti. Penegakan hukum tersebut juga didukung melalui koordinasi dengan kepolisian, TNI, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan, baik internal seperti keterbatasan personel, sarana prasarana, dan anggaran, maupun eksternal berupa kondisi geografis yang sulit, faktor sosial ekonomi masyarakat, dan rendahnya kesadaran hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Kecamatan Trumon Timur belum berjalan secara optimal karena masih maraknya praktik perusakan hutan. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan anggaran dan sarana prasarana, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum guna mendukung keberhasilan penegakan hukum dan kelestarian hutan.

Kata Kunci: Penegakan hukum, *Illegal logging*, *Aceh Selatan.*